KOLABORASI OPERASI YUSTISI KEPENDUDUKAN BAGI PEKERJA MIGRAN DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Abraham Christo Mehue
NPP. 32.1033
Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: abrahammehue11@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Administrative non-compliance among the migrant population poses a significant challenge to urban governance, especially in areas with large migrant inflows such as Jayapura City This study examines collaborative governance through population justice operations targeting migrant workers.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the collaboration on population justice operations for migrant workers.* ***Method:*** *The exploration-based study uses a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with key stakeholders in Jayapura City from Satpol PP, Dukcapil, migrant workers, and community leaders. The interview data was analyzed thematically and triangulated with observation and documentation data.* ***Result:*** *The results of the study show that in the initial condition dimension, adequate resources were found from the implementing party but there were budget constraints that were not in accordance with the distribution of the migrant population; In the dimension of the collaboration process, it was found that there was a lack of private sector involvement; In the dimension of temporary results, good coordination was found between the implementing parties even though there were few obstacles* ***Conclusion:*** *The research concluded that the collaboration of population justice operations for migrant workers in Jayapura City has been effective. The research suggests the need to provide adequate budget allocation to align with demographic realities and the establishment of formal private sector integration mechanisms, which has the impact of transforming Jayapura City into a model of administrative compliance while balancing enforcement with consideration of migrant welfare.*

Keywords: *Order, Collaborative Governance, Migrant Workers*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakpatuhan administratif di kalangan populasi migran menjadi tantangan signifikan bagi tata kelola perkotaan, terutama di wilayah yang mengalami arus masuk migran yang besar seperti Kota Jayapura. Penelitian ini mengkaji tata kelola kolaboratif melalui operasi yustisi kependudukan yang menargetkan pekerja migran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi operasi yustisi kependudukan bagi pekerja migran. **Metode:** Studi berbasis eksplorasi menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama di Kota Jayapura dari pihak Satpol PP, Dukcapil, pekerja migran, dan tokoh masyarakat. Penggunaan teori *Collaborative Governance* dalam penelitian dengan data hasil wawancara dianalisis secara tematik dan dilakukan triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi awal ditemukan sumber daya yang memadai dari pihak pelaksana namun adanya kendala keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan distribusi populasi migran; pada dimensi proses kolaborasi ditemukan minimnya keterlibatan sektor swasta; pada dimensi hasil sementara ditemukan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana meskipun ditemukan sedikit kendala. **Kesimpulan:** Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi operasi yustisi kependudukan bagi pekerja migran di Kota Jayapura telah berjalan efektif. Saran penelitian yakni perlunya penyediaan alokasi anggaran yang memadai agar selaras dengan realitas demografis dan pembentukan mekanisme integrasi sektor swasta formal, yang berdampak mengubah Kota Jayapura menjadi model kepatuhan administratif sambil menyeimbangkan penegakan dengan pertimbangan kesejahteraan migran.

Kata kunci: Ketertiban, Kolaborasi Pemerintahan, Pekerja Migran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Populasi penduduk merupakan salah satu faktor kunci dalam memahami dinamika sosial,ekonomi,dan lingkungan di suatu negara. Perubahan dalam jumlah,distribusi, dan karakteristik demografis penduduk dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan,termasuk pertumbuhan ekonomi, penyediaan layanan public, dan keberlanjutan lingkungan (Diana, 2024). Pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia dapat menjadi masalah besar bagi beberapa negara. Menurut *World Population Prospects* 2024 menunjukan bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270.203.917 jiwa. Akibat kepadatan penduduk di Indonesia, Pemerintah gencar mengadakan transmigrasi sebagai salah satu cara untuk menghadapi masalah tersebut. Selama ini, penyelenggaraan transmigrasi bersifat sentralistik, tetapi sekarang menghadapi tantangan untuk menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi. Tekanan domestik untuk mempertahankan program transmigrasi didasarkan pada desentralisasi. Saat ini, tantangan transmigrasi tidak hanya berkaitan dengan pemerataan jumlah penduduk, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembangunan daerah (Purba & Saleh, 2023).

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor yang memengaruhi perubahan jumlah penduduk. Migrasi dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Keragaman kondisi dan potensi antarwilayah di Indonesia merupakan situasi yang mendukung terjadinya migrasi. Selain itu, masalah migrasi di Indonesia berkaitan dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi mengenai migrasi yang dapat dijadikan masukan untuk perencanaan pembangunan dan pemecahan masalah sosial dan juga sebagai bahan dalam

penyusunan kebijakan transportasi dan permukiman penduduk (BPS Indonesia, 2023). Migrasi di Indonesia memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, bagi daerah asal maupun daerah tujuan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari program transmigrasi yakni pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, peningkatan ekonomi daerah, penyediaan lapangan kerja, penyebaran kebudayaan. Dampak transmigrasi sangat bergantung pada bagaimana program ini diimplementasikan dan dukungan yang diberikan kepada para transmigran serta masyarakat lokal. Pengelolaan yang baik dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan oleh program ini (Mariyani et al., 2023).

Operasi Yustisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi transmigran. Kegiatan ini menjadi penting mengingat masih banyaknya pekerja yang tidak memiliki identitas resmi atau memiliki identitas yang tidak sesuai dengan domisili kerjanya.(Zhou et al., 2025). Pemerintah Kota Jakarta berhasil menjalankan operasi yustisi tersebut pada februari 2023 berlokasi di Jakarta Pusat sebanyak 127 pekerja berhasil terjaring, Satpol PP Kota Surabaya berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 350 pekerja di Kawasan Industri Rangkut,dan Penertiban administrasi pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung mengalami beberapa masalah. Selain koordinasi antar instansi yang kurang baik, adanya keterbatasan dalam anggaran dan peralatan serta penolakan dari warga menjadi masalah yang membuat operasi ini berjalan belum optimal (Liang, 2024).

Operasi yustisi terhadap pekerja migran di Kota Jayapura merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan hukum, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan operasi ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal (Teknoyasa, 2022). Penelitian ini penting dilakukan karena belum ada studi yang mengkaji kolaborasi Satpol PP dengan Dinas lain terkait secara komprehensif. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan layanan administrasi kependudukan bagi pekerja migran serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan (Nasution, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Gejala serta fakta empiris yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan urgensi kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pelaksanaan operasi yustisi kependudukan bagi pekerja migran di Kota Jayapura. Masalah administrasi bagi pekerja migran yang berkembang di wilayah ini bukan hanya menjadi isu sederhana, melainkan juga menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas (Jang et al., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan intersektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Satpol PP, yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum.

Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi oeprasi yustisi di daerah ini. Pertama, kurangnya pembaharuan dan integrasi data mengenai jumlah pekerja migran mengakibatkan tidak tersedianya informasi yang akurat sebagai dasar penentuan lokasi operasi yustisi. Kedua,Kurangnya anggaran pelaksanaan operasi yustisi sehingga terjadi ketidaksesuaian target operasi dengan anggaran operasi. Ketiga, belum adanya kerjasama yang intensif antar pelaksana operasi dengan Perusahaan tempat pekerja migran, padahal kerja sama lintas sektor merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam upaya menertibkan adminitrasi kependudukan pekerja migran.

Melihat perhatian pemerintah terhadap penertiban administrasi kependudukan pekerja migran serta perlunya pendekatan yang lebih terpadu, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana bentuk kolaborasi yang dijalin antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam menjalankan Operasi Yustisi kependudukan bagi pekerja migran. Program ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan penertiban administrasi kependudukan secara komprehensif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas operasi yustisi kependudukan di Kota Jayapura. Temuan ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam upaya penyempurnaan system layanan administrasi kependudukan bagi pekerja migran yang lebih baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa kajian terdahulu yang membahas operasi ysutisi kependudukan melalui pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Pertama, penelitian oleh (Indhawati et al., 2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan mengingatkan masyarakat akan protokol kesehatan selama masa covid-19. Persamaan dengan hal yang diteliti dalam skripsi ini yaitu sama-sama ingin mengetahui upaya pemerintah daerah dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan instansi terkait dengan cara terjun ke lapangan langsung melalui operasi yustisi. Sedangkan aspek pembeda kedua penelitian ini yaitu pada fokus instansi yang di teliti dan tindak lanjut dari pelayanan yang di lakukan. Selanjutnya, penelitian oleh (Junaedi, 2022) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Melalui Operasi Yustisi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama ingin mengetahui proses pelaksanaan penegakan peraturan daerah melalui operasi yustisi yang dikakukan oleh instansi terkait, namun fokus kajian penelitiannya berbeda yaitu penelitian oleh Gatot Sambas Junaedi mengkaji tentang pelaksanaan penegakan peraturan daerah secara umum contohnya seperti pelaksaanan operasi yustisi pedagang kaki lima (PKL), penyuluhan dan pembinaan sedangkan peneliti mengkaji mengkaji terkait sejauh mana pelaksanaan tugas Satpol PP melalui operasi yustisi terhadap imigan. Oleh karena itu, perbedaan penelitian yang dilakukan juga terletak pada lokus penelitian. Penelitian oleh Junaedi dilaksanakan hanya di Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan peneliti mengambil lokus di beberapa instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta Pemerintahan Kelurahan. Penelitian lainnya terkait operasi yustisi kependudukan yang dilakukan oleh (Sulaiman, 2023) yang berjudul Penertiban Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Ganda dalam menunjang Validitas Data Kependudukan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian saat ini yaitu menyoroti fokus kajian Penertiban Administrasi Kependudukan, khususnya peneliti mengacu pada Peraturan Daerah yang sama-sama ingin mengetahui faktor penghambat dalam Penertiban administrasi tersebut. Sedangkan kecenderungan perbedaan kedua penelitian ini dapat dilihat dari lokus penelitian dan objek penelitian. Sulaiman memilih lokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Sedangkan lokus penelitian skripsi saat ini yaitu pada dua OPD yaitu Satua Polisi Pamong Praja dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman berfokus pada objek administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang ganda. Sedangkan peneiliti hanya memilih fokus objek yaitu KTP yang belum diganti menjadi daerah tujuan transmigrasi bagi para pekerja migran. Penelitian Angga Arista (2024)

berjudul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penanganan ODGJ terlantar di daerah tersebut telah menunjukkan kolaborasi antar sektor seperti Dinas Sosial, organisasi perangkat daerah, rumah sakit, dan yayasan. Meskipun kolaborasi telah terbentuk, masih diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan konsep *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash. Namun, penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada lokasi dan fokus kajiannya yang berbeda yakni objek kolaborasi tersebut dan juga berbeda dari konteks Kota Jayapura. Disi lain Voni Leorna (2021) dalam Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran di Kota Bandar Lampung mengidentifikasi bahwa kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial telah berjalan sesuai perintah otoritas lokal, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek mutualitas dan lingkungan kolaborasi. Penelitian ini belum menyinggung perlibatan pihak ketiga sebagai bentuk kolaborasi yang baik yakni .

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Sebuah penelitian dilakukan dengan berorientasi pada pemecahan masalah serta penemuan baru. Merujuk pada prinsip “no problem-no research” dan “no innovation-no research” dalam buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan, maka penelitian ini perlu adanya sumber-sumber informasi yakni “penelitian sebelumnya”, dengan merujuk pada studi-studi yang relevan dengan topik yang diteliti, yang dapat menjadi referensi dan mendukung argumen, walaupun memiliki perbedaan teori yang digunakan (Wasistiono, 2024). Untuk mempermudah pencarian bahan penelitian, digunakannya bantuan aplikasi Publish or Perish dengan keyword “Operasi Yustisi Kependudukan” baik bersumber dari jurnal maupun buku pada rentang waktu 2021-2024 sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut:

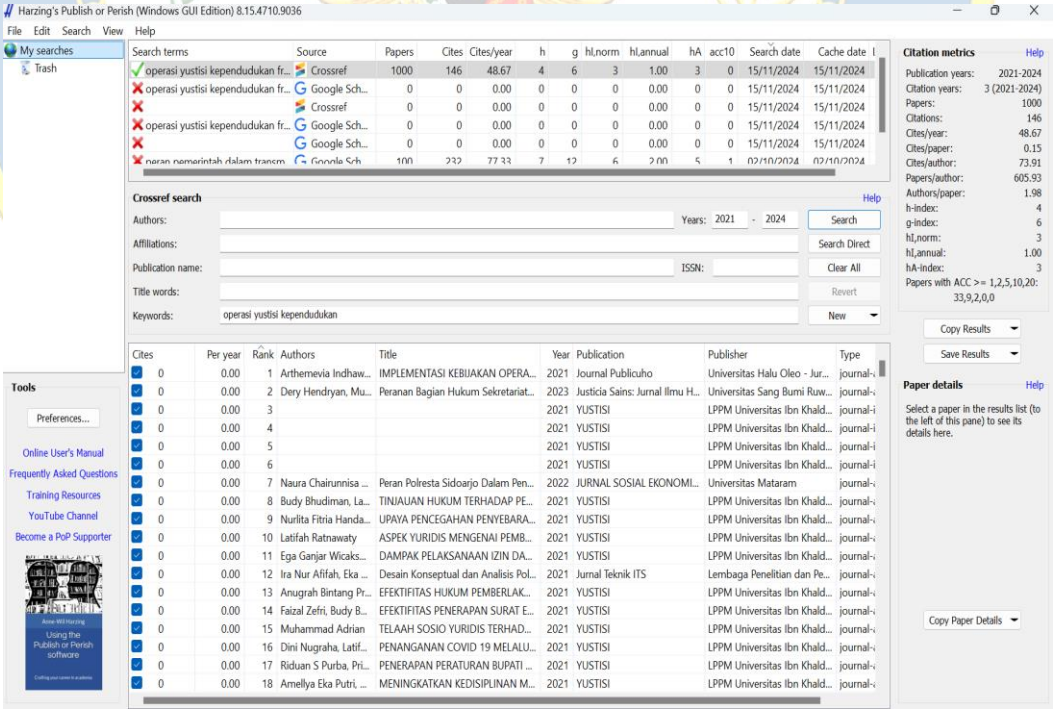

Gambar 2. 1 Tampilan Hasil Pencarian Publish or Perish

Gambar 2.1 menampilkan hasil pencarian berdasar database pada Crossref dengan aplikasi Publish or Perish, di mana data hasil pencarian tersebut memperoleh sebanyak 146 penelitian terkait Operasi Yustisi Kependudukan. Semua data tersebut kemudian diolah kembali menggunakan Mendeley dan divisualisasikan menggunakan aplikasi VOSviewer untuk mendapatkan bibliometrik. Penelitian kualitatif membutuhkan bibliometrik untuk mengetahui topik yang paling diminati dan tren penelitian yang sedang berkembang (Padmalia, 2023).

VOSviewer mempermudah dalam mengidentifikasi pola, tren, dan kelompok yang ada dalam literatur ilmiah tentang topik tertentu yang dapat mendukung pengembangan penelitian selanjutnya sesuai Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong. Berikut ditampilkan hasil bibliometrik dari pengolahan data pada aplikasi VOSviewer:

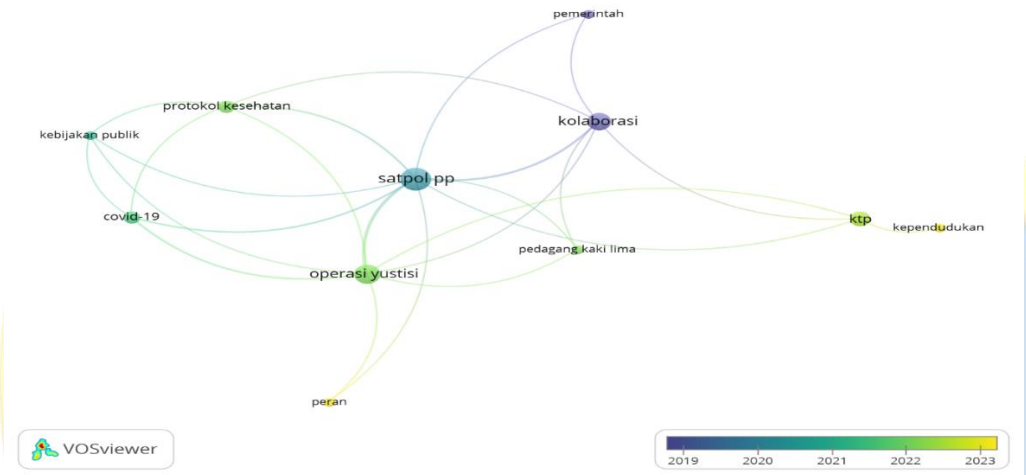

Gambar 2. 2 Tampilan Overlay Visualization Hasil Bibliometrik dari VOSviewer

` VOSviewer memiliki tiga tampilan visualisasi berbeda yaitu Network Visualisation untuk memperlihatkan jaringan antar istilah, Overlay Visualization untuk menampilkan jejak historis penelitian, dan Density Visualization untuk menampilkan tingkat pembahasan pada topik penelitian. Gambar 2.2 menampilkan bibliometrik secara Overlay Visualization. Bulatan besar menjadi penanda bahwa topik tersebut ialah isu yang paling sering dilakukan penelitian, yakni terkait operasi yustisi kependudukan.

Kumpulan penelitian dalam kurun waktu 2021-2024 menunjukkan keterkaitan terhadap isu utama yaitu operasi yustisi dan kolaborasi. Letak penelitian ini dalam penelitian terdahulu dengan pemanfaatan aplikasi VOSviewer yaitu mengenai *collaborative governance*. Satpol PP bersama Disdukcapil melalui operasi yustisi kependudukan menjadi faktor determinan dalam penelitian ini sebagai langkah kolaborasi penertiban administrasi kependudukan bagi pekerja migran.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengeksplorasi bagaimana kolaborasi operasi yustisi kependudukan bagi pekerja migran di Kota Jayapura Provinsi Papua.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain studi eksploratif yang mengadopsi pendekatan kualitatif, yang secara khusus difokuskan pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jayapura kurang lebih satu bulan yang dilaksanakan dari pertengahan bulan januari sampai bulan februari. Studi ini didasarkan pada kerangka teoretis *Collaborative Governance* yang digunakan untuk memahami dinamika dan pola interaksi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti (Nasution, 2023). Informan penelitian berjumlah 7 orang yang berasal dari unsur Satpol PP, Disdukcapil, serta perwakilan pekerja migran sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengalaman langsung dalam proses kolaboratif yang dimaksud. Sebagai informan kunci yakni kepala seksi pindah datang penduduk dan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan selanjutnya dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi pola-pola penting yang muncul dari narasi para informan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, proses triangulasi data dilakukan dengan mengintegrasikan hasil observasi lapangan dan analisis terhadap dokumen-dokumen relevan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan kolaborasi Operasi Yustisi Kependudukan Bagi pekerja migran di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan melihat pada dimensi proses kolaborasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada indikator berikut.

3.1 Kondisi Awal Terjadinya Kolaborasi

Berdasarkan pembahasan mengenai kondisi awal dan implementasi kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi kedua lembaga ini telah memiliki fondasi yang cukup kuat namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.Kolaborasi ini dibangun di atas landasan hukum yang solid melalui Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kesesuaian antara struktur organisasi dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga telah menciptakan kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan operasi yustisi kependudukan. Hal ini diperkuat dengan adanya sinergi multi-lembaga yang melibatkan tidak hanya Satpol PP dan Dukcapil, tetapi juga Kepolisian dan Kejaksaan, menunjukkan koordinasi yang baik antar instansi dalam mencapai tujuan bersama yaitu tertib administrasi kependudukan.

Namun demikian, implementasi kolaborasi ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan operasi secara optimal di seluruh wilayah Kota Jayapura. Kondisi ini diperparah dengan terus bertambahnya jumlah pekerja migran setiap tahunnya, sementara alokasi dana dari APBD belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya pekerja migran, terhadap pentingnya administrasi kependudukan masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak pekerja

migran yang datang tanpa dokumen resmi atau belum melakukan pencatatan kependudukan sesuai peraturan yang berlaku. Kendala teknis operasional juga turut mempengaruhi efektivitas program, terutama dalam hal pemrosesan data secara cepat di lapangan dan cakupan layanan yang luas mengingat geografis Kota Jayapura dan tingginya mobilitas penduduk.

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, Dukcapil telah melakukan inovasi pelayanan seperti sistem pendaftaran daring dan layanan jemput bola khusus untuk pekerja migran yang kesulitan mengurus dokumen mereka. Upaya ini menunjukkan adaptasi lembaga terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat, meskipun masih perlu didukung dengan sumber daya yang memadai.Keberhasilan kolaborasi ini ke depan sangat bergantung pada peningkatan alokasi anggaran yang memadai serta optimalisasi efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Dengan dukungan anggaran yang cukup, operasi yustisi kependudukan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pekerja migran dan berkontribusi pada terciptanya data kependudukan yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial di Kota Jayapura. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang menjadi tujuan utama kolaborasi antara kedua lembaga tersebut.

3.2 Peran Pemimpin dalam Kolaborasi Operasi Yustisi Kependudukan

Berdasarkan analisis mengenai kepemimpinan dan koordinasi dalam pelaksanaan Operasi Yustisi kependudukan antara Satpol PP dan Dinas Dukcapil Kota Jayapura, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kolaborasi ini tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia yang memadai dan kepemimpinan yang efektif. Ketersediaan personil dari kedua lembaga, yang didukung oleh kolaborasi dengan pihak Kejaksaan, telah menciptakan kondisi yang sangat memadai untuk melaksanakan operasi secara optimal. Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban dan mendukung penegakan aturan, sementara Dukcapil fokus pada pemeriksaan dokumen kependudukan dan pemberian layanan administrasi bagi pekerja migran. Meskipun jumlah personel cukup memadai, tantangan tetap hadir terutama dalam menjangkau wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga operasi dilaksanakan secara berkala dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Aspek kepemimpinan menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan kolaborasi, mengingat bahwa dalam setiap kerja sama antar lembaga selalu berpotensi muncul konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan. Kepala Satpol PP menunjukkan gaya kepemimpinan yang responsif dan aktif dengan memantau dinamika tim melalui laporan langsung dari anggota serta mengadakan diskusi terbuka ketika terjadi ketegangan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pandangan dan keluhan, sehingga memungkinkan pencarian solusi bersama. Sementara itu, pemimpin Dukcapil lebih mengedepankan pendekatan mendengar dan komunikasi terbuka untuk memastikan bahwa setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan dengan cara yang mendukung koordinasi dan kelancaran tugas.

Koordinasi antar lembaga terlaksana dengan intensitas yang tinggi melalui pertemuan rutin dan terstruktur yang tidak hanya melibatkan Satpol PP dan Dukcapil, tetapi juga mengikutsertakan pihak kepolisian sebagai mitra strategis. Pertemuan-pertemuan ini menjadi forum penting untuk perencanaan, evaluasi, dan memastikan kesiapan semua pihak. Fleksibilitas koordinasi juga ditunjukkan melalui pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp untuk komunikasi yang lebih

cepat terkait perkembangan operasi. Pola koordinasi yang intensif ini menciptakan sinergi yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan yang kolaboratif dan komunikatif, didukung dengan koordinasi yang intensif serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, menjadi fondasi utama keberhasilan operasi yustisi kependudukan di Kota Jayapura. Kepemimpinan yang efektif terbukti mampu menciptakan kerja sama yang solid, meminimalkan konflik, dan memastikan tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

3.3 Kesamaan Pemahaman Terkait Tujuan Operasi Yustisi

Penulis melakukan penggalian informasi terkait proses kolaborasi yang dilakukan kepada pihak Satpol PP dan Disdukcapil untuk melihat pandangan mereka terhadap adanya kolaborasi operasi yustisi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diinterpretasikan bahwa Operasi Yustisi Kependudukan merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan administrasi kependudukan, terutama bagi pekerja migran yang berada di Kota Jayapura. Agar operasi ini berjalan efektif, kesamaan pemahaman dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, menjadi faktor penting yang harus dicapai.

Kesamaan pemahaman berarti adanya kesepakatan bersama mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan operasi ini. Pemerintah dan petugas yang terlibat harus memahami bahwa tujuan utama dari Operasi Yustisi Kependudukan adalah memastikan bahwa setiap penduduk, terutama pekerja migran, memiliki dokumen kependudukan yang sah. Hal ini penting untuk menjamin akses mereka terhadap layanan publik, perlindungan hukum, serta hak-hak lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekerja migran mempunyai pemahaman yang sama tentang pentingnya dokumen kependudukan akan membantu mereka dalam menjalankan aktivitas kerja secara legal dan aman. Sementara itu, bagi masyarakat setempat, pemahaman ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi serta mencegah potensi konflik sosial akibat perbedaan status kependudukan.

Proses operasi yustisi tidak dilakukan secara mandiri oleh Satpol PP, melainkan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Koordinasi utama dilakukan bersama Disdukcapil, termasuk Kepolisian, Kejaksaan,serta Kelurahan yang berperan dalam asesmen sosial dan pengawalan proses penanganan. Satpol PP berperan sebagai penegak peraturan daerah (Perda), memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku Dukcapil berfungsi sebagai penyelenggara utama, yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan administrasi kependudukan. Sementara itu, pihak Kepolisian turut serta dalam operasi dengan tugas menertibkan lalu lintas dan menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Adapun Kejaksaan berperan dalam memberikan putusan hukum bagi pelanggar yang ditemukan dalam operasi yustisi tersebut. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas ini, operasi yustisi kependudukan di Kota Jayapura dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Operasi Yustisi Kependudukan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau resistensi dari pihak-pihak yang terlibat. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, pekerja migran, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, serta mendukung kesejahteraan bersama di Kota Jayapura.

3.4 Mekanisme Koordinasi Pelaksana Kolaborasi Operasi Yustisi Kependudukan

Berdasarkan analisis mekanisme kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Dukcapil Kota Jayapura dalam pelaksanaan operasi yustisi kependudukan, dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga telah mengembangkan sistem kolaborasi yang sistematis dan terstruktur untuk mewujudkan ketertiban administrasi kependudukan yang efektif bagi pekerja migran. Mekanisme ini dibangun melalui pendekatan yang komprehensif, dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi berkelanjutan.Proses kolaborasi dimulai dengan tahap perencanaan dan penyusunan strategi yang melibatkan pertemuan teknis antara kedua instansi untuk menyusun rencana kegiatan yang mencakup penentuan lokasi operasi, sasaran, dan metode pelaksanaan. Dalam tahap ini, data kependudukan dari Dinas Dukcapil menjadi landasan penting untuk menetapkan area dengan tingkat kepadatan pekerja migran yang tinggi, sehingga operasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan efisien. Berikut ini Gambaran mekanisme pembagian tugas pelaksana operasi yustisi :

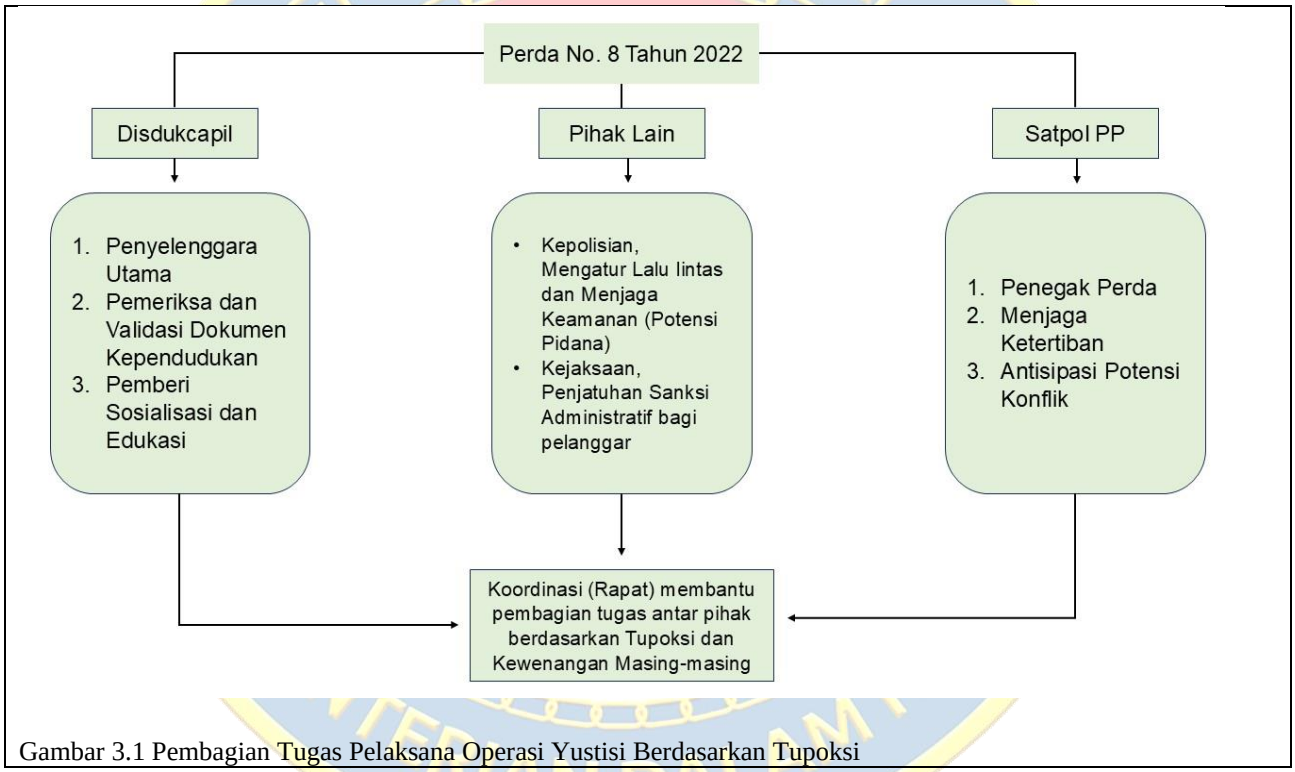

Gambar 3.1 Pembagian Tugas Pelaksana Operasi Yustisi Berdasarkan Tupoksi

Pada tahap pelaksanaan operasi, pembagian peran antara kedua lembaga telah didefinisikan dengan jelas sesuai tupoksi masing-masing. Satpol PP mengambil peran dalam aspek pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum bagi pekerja migran yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, sementara Dinas Dukcapil fokus pada verifikasi data kependudukan di lapangan dan memberikan arahan terkait prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif melalui kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya dokumen kependudukan yang sah, bahkan Dinas Dukcapil memberikan layanan pendaftaran kependudukan langsung di lokasi operasi bagi mereka yang belum memiliki dokumen resmi. Keberlanjutan dan peningkatan kualitas kerja sama dijaga melalui mekanisme evaluasi dan rapat koordinasi rutin yang membahas perkembangan pelaksanaan operasi, kendala yang dihadapi di lapangan, serta strategi

perbaikan untuk operasi berikutnya. Mekanisme evaluasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan sinergi dan efektivitas kolaborasi, memastikan bahwa setiap operasi yang dilaksanakan dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan terus menyempurnakan pendekatan yang digunakan.

Secara keseluruhan, mekanisme kerja sama yang telah dikembangkan oleh Satpol PP dan Dinas Dukcapil Kota Jayapura menunjukkan model kolaborasi antar lembaga yang matang dan berkelanjutan. Pendekatan yang sistematis, pembagian peran yang jelas, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan melalui evaluasi rutin menjadi faktor-faktor yang mendukung efektivitas operasi yustisi kependudukan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Jayapura.

3.5 Dampak Sementara

Penulis melakukan eksplorasi terhadap dampak yang dihasilkan dari adanya proses kolaborasi Operasi Yustisi Kependudukan yang dilaksanakan bagi pekerja migran di Kota Jayapura telah memasuki tahap evaluasi awal. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja migran yang mencari nafkah di kota ini.

Tantangan yang dihadapi yakni anggaran yang terbatas, operasi ini tetap berjalan dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. Aparat penegak hukum, instansi terkait, serta elemen masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga operasi ini dapat berlangsung secara efektif dan tertib.Persentase hasil sementara dari operasi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran para pekerja migran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah. Pendataan yang lebih akurat juga mulai terbentuk, menjadi langkah awal dalam mewujudkan sistem kependudukan yang lebih tertib dan terstruktur.

Operasi yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya dalam hal penegakan hukum, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi seluruh warga Kota Jayapura, termasuk para pekerja migran yang menjadi bagian dari dinamika sosial dan ekonomi daerah ini. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaan operasi yustisi, di antaranya: Kerja sama yang baik antara pekerja migran dan penyelenggara operasi yustisi.Pekerja migran yang terjaring dalam operasi ini bersikap kooperatif dalam mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga memperlancar jalannya operasi. Di sisi lain, petugas yang bertanggung jawab dalam operasi juga menunjukkan profesionalisme dan pendekatan yang humanis dalam menangani para pekerja migran. Keterlibatan pemangku kepentingan yang kolaboratif.Berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran, turut serta dalam operasi ini. Keterlibatan mereka memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam menangani pekerja migran yang terjaring, termasuk dalam aspek administrasi, hukum, serta pemulangan bagi mereka yang tidak memiliki dokumen resmi.Pelayanan yang cepat, tepat, dan baik bagi pekerja migran yang terjaring. Salah satu aspek penting yang mendukung keberhasilan operasi ini adalah adanya sistem pelayanan yang responsif bagi pekerja migran yang terjaring. Mereka tidak hanya diberikan pemrosesan dokumen dengan cepat, tetapi juga memperoleh informasi dan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal pemulangan, legalisasi dokumen, maupun perlindungan hukum.

Proses pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat efektivitas operasi yustisi ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya anggaran bagi pelaksana operasi, yang berdampak pada terbatasnya cakupan operasi yustisi. Dengan keterbatasan anggaran,

jumlah pekerja migran yang dapat dijangkau dalam operasi ini masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antar pemangku kepentingan sudah cukup baik, masih diperlukan dukungan lebih lanjut dalam hal alokasi dana agar operasi dapat menjangkau lebih banyak individu yang perlu ditertibkan.

Efektivitas kolaborasi dalam operasi yustisi di Kota Jayapura secara keseluruhan dapat dikatakan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal dukungan anggaran. Keberhasilan menjaring 307 pekerja migran merupakan bukti nyata bahwa koordinasi dan kerja sama yang terjalin antara berbagai pihak telah menghasilkan dampak yang signifikan. Dengan adanya peningkatan dukungan, baik dari segi sumber daya maupun regulasi, operasi yustisi kependudukan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Dukcapil serta pihak lain dapat dikatakan efektif dengan berbagai pertimbangan yang di amati.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi operasi yustis kependudukan di Kota Jayapura cukup efektif dengan minimnya anggaran. Berbeda dengan studi Angga Arista (2024) yang menampilkan kolaborasi yang telah terbentuk antar dinas dan lembaga sosial di Kabupaten Muara Enim, namun dengan kendala pelaksanaan yang serupa, penelitian ini menyoroti lemahnya keberlanjutan dan sistematisasi koordinasi, khususnya antara Satpol PP dan pihak perusahaan. Sementara itu, (Takaya, 2025) mencatat bahwa kolaborasi di Tokyo, Jepang berjalan atas dasar otoritas lokal, namun belum menyentuh aspek mutualitas dan pelibatan lebih perusahaan, suatu aspek yang justru menjadi fokus utama dalam penelitian ini melalui pendekatan langsung pada koordinasi Satpol PP dan Disukcapil. Dibandingkan dengan temuan (Syaifudin & Wardhani, 2023) yang mengidentifikasi hambatan eksternal dari masyarakat dan pekerja migran dalam tertib administrasi kependudukan, penelitian ini lebih menyoroti persoalan teknis administratif dan logistik yang menghambat efektivitas penertiban. Selain itu, (Hanyfa & Eni Rustianingsih, 2024) lebih menyoroti aspek situasi social objek kolaborasi tanpa membahas dinamika koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menyoroti kebutuhan mendesak akan sistem kolaborasi yang sistematis dan berkelanjutan antara unsur keamanan daerah (Satpol PP) dan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil), serta menekankan pentingnya dukungan infrastruktur, logistik, dan administratif sebagai prasyarat keberhasilan operasi yustisi kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kolaborasi Satpol PP dengan Dinas Dukcapil Kota Jayapura sudah berjalan dengan efektif, namun perlu didampingi dengan penganggaran yang sesuai agar hasil yang ditargetkan bisa lebih maksimal serta peningkatan sarana sosialisasi tertib dokumen administrasi bagi pekerja migran di Kota Jayapura. Kesimpulan masing-masing dimensi yakni Kondisi Awal masing-masing perangkat daerah yang sudah baik, hal ini dilandasi dengan adanya peraturan daerah terkait pelaksanaan operasi yustisi tersebut, sehingga kedua pihak dapat menjalankan operasi tersebut dengan baik. Namun adanya keterbatasan anggaran yang membuat penyebaran pelaksanaan operasi yang tidak merata. Kepemimpinan Fasilitatif yang memadai dari kedua pihak, terlihat dari koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang sering dilakukan baik dari rapat tatap muka (*offline)* atau daring (*online).* Dan juga perlu adanya Kerjasama dari instansi lain seperti Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi. Desain Kelembagaan yang sudah baik, dilihat dari kesesuaian pembagian tugas dan fungsi masing-masing pihak yang sejalan

dengan peraturan daerah yang berlaku, namun perlu dipertimbangkan untuk melibatkan kecamatan atau kelurahan secara proporsional dalam pelaksanaan operasi ini agar mekanisme koordinasi terkait wilayah pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik. Proses Kolaborasi yang dilaksanakan dapat dinilai cukup efektif dilihat dari jumlah pekerja migran yang terjaring pada saat operasi, namun perlu adanya partisipasi aktif baik dari pihak pemberi manfaat maupun penerima manfaat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa pekerja migran sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ansell dan Gash.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih bersifat eksploratif dan belum sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas implementasi program. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan di lokasi sejenis dalam konteks pelaksanaan operasi yustisi kependudukan, guna memperoleh temuan yang lebih mendalam dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP dan Kepala Disdukcapil Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Tidak lupa juga terima kasih untuk seluruh pihak yang membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arista, A. 2024. "*Collaborative Governance* Dalam Penanganan ODGJ Terlantar Di Kabupaten Muara Enim." http://eprints.ipdn.ac.id/19000/1/Repository%20Angga%20FIX.pdf

BPS Indonesia, (2023). Statistik Indonesia. *Statistik Indonesia 2023*, *1101001*, 790. https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html

Diana, N. (2024). ANALISIS POPULASI PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN INFLASI DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2018-2023. *Αγαη*, *15*(1), 37–48. https://repository.radenintan.ac.id/35742/1/PUSAT%201%202%20NORA.pdf

Hanyfa, M. R., & Eni Rustianingsih. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kesamben Kulon. *Journal Publicuho*, *7*(3), 1471–1488. https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507

Indhawati, A., Izzuddin, P. R., Yahya, M. A., & Hardjati, S. (2021). Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*, *4*(2), 472–486. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18060

Jang, J. H., Noh, Y., & Kim, J. S. (2025). Validation of a Digital Human-Based Safety Education Framework for Migrant Construction Workers in Korea Using the CIPP Model and a Modified Delphi Study. *Sustainability (Switzerland)*, *17*(1), 1–18. https://doi.org/10.3390/su17010169

Junaedi, G. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Tatapamong*, *4*(September), 102–112.

https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589
Liang, X. (2024). Immigration regulations as frame of reference: trade-off between precarious employment and precarious legal status among US student-migrant-workers. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, *51*(5), 1207–1227. https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2382373
Mariyani, S., Seprina, R., Sejarah, P., & Jambi, U. (2023). *PERKEMBANGAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MASA ORDE BARU 1966-1998 SEBAGAI BAHAN AJAR SEJARAH SMAN 3 KOTA JAMBI*. *1*(3), 109–121. https://doi.org/10.22437/jeso.v1i1.15487
Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.); 1st ed.). Harfa Creative.
Padmalia, M. (2023). Firm resilience research development : A Bibliometric Analysis with Vosviewer. *Business and Accounting Research (IJEBAR) , 7*(1), 274–286. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR
Purba, Y. Z. W., & Saleh, W. (2023). Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian. *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)*, *1*(1), 71–92. https://doi.org/10.48093/jurdianpasti.v1i1.132
Sulaiman. (2023). *Penertiban Kepemilikan KTP dan KK Ganda Dalam Menunjang Validitas Data Kependudukan*. *1*, 1–23. https://repository.wiraraja.ac.id/769/1/SULAIMAN.pdf
Syaifudin, S. L., & Wardhani, N. I. K. (2023). Program KALIMASADA: Peningkatan Jenis Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Rungkut. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *3*(4), 435–443. https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.498
Takaya, S. (2025). Policy change and national identification: the discursive institutionalism of Japan's migrant admission policy. *Social Science Japan Journal*, *28*(1). https://doi.org/10.1093/ssjj/jyaf002
Teknoyasa, A. (2022). *ABDI Teknoyasa, Volume 3, No.2, Desember 2022*. *3*(2), 2022. https://journals2.ums.ac.id/index.php/abditeknoyasa/issue/view/56/8
Wasistiono, S. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (A. Ulinnuha & Tarmizi (eds.); 1st ed.). Bumi Aksara. https://bibleandbookcenter.com/read/metode-penelitian-ilmu-pemerintahan-mpip-edisi-revisi/
Zhou, Y., Wang, Z., Wang, W., & Wang, Y. (2025). The Impact of Migrant Workers' Return Behaviors on Land Transfer-in: Evidence from the China Labor Dynamic Survey. *Land*, *14*(4), 1–28. https://doi.org/10.3390/land14040869